

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ditujuh. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.¹

Kata efektif juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan

¹Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, and Johny Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), Jurnal Eksekutif 2, no. 2 (2017): 2–11.

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²

Menurut Ravianto dalam Masruri dan Imam, pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.³

Pengertian Efektifitas menurut Herlina Yustati Efektifitas merupakan suatu tindakan dari penerima melakukannya dengan suatu yang bermakna sesuai dengan yang diinginkan pengirim.⁴

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara

²Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1, no. 1 (2012): 1–9.

³Masruri and Imam Muazansyah, *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp)*, *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 2 (2017): 364–393.

⁴Yustati Herlina, *'Efektifitas Instagram Sebagai Media Persuasi Filantropi Islam Bagi Mahasiswa IAIN Bengkulu'*, Jurnal Komunikasi, 2019, 83–101.

efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif.⁵

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

2. Cara Mengukur Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat

⁵Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1, no. 1 (2012): 1–9.

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶

3. Kriteria Tercapainya Tujuan Efektifitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- d. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

⁶Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1, no. 1 (2012): 1–9.

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.⁷

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a) Produktivitas
- b) Kemampuan adaptasi kerja
- c) Kepuasan kerja
- d) Kemampuan berlaba
- e) Pencarian sumber daya

Sedangkan Richard M. Steers dalam mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁸

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan

⁷Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1, no. 1 (2012): 1–9.

⁸Tri dan Dipta Tri Yuniningsih and Dipta Kharisma, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 54, no. 7 (2014): 283–288.

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi

- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Iga Rosalina yaitu; Perencanaan yang matang, Tersedianya sarana dan prasarana, Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

4. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁹

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi

⁹Damianus Ding, 'Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu', E-Journal Ilmu Pemerintah, 2.2 (2014), 2888–2902.

sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam

kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari bahasa inggris *Empowerment*, pemberdayaan berasal dari kata dasar *power* yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu

“*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan.¹⁰

Pemberdayaan menurut Lili Bariadi, dkk dalam Nailul Muna dkk berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.¹¹ Pemberdayaan menurut Mas’oed dalam Iin Sarinah dkk adalah ‘Upaya memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.’¹²

Jadi dengan kata lain pemberdayaan merupakan suatu aspek yang digunakan manusia untuk mengolah

¹⁰Muhammad Alhada Fuadilah Habib, *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif, Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106–134.

¹¹Nailul Muna, Zaki Fuad, and Cut Dian Fitri, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (2021): 11–17.

¹²Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin, and Erlan Suwarlan, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, Jurnal Moderat, Universitas galuh Pangandaran 5, no. 3 (2019): 267–277.

suatu sumber daya dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efektif.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹³ Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.¹⁴ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:¹⁵

¹³Salsabila Fatine, 'Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui Umkm Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang', *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1.2 (2022), 78–83 <<https://doi.org/10.34312/ljpm.v1i2.15346>>.

¹⁴Murdani, Sus Widayani, and Hadromi, 'Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)', *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23.1 (2019), 152–57.

¹⁵Dean Gilbert Mahino, Johannis Kaawoan, and Kasenda Ventje, 'Dampak Sosial Ekonomi Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017)', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018).

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas menggunakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.

2. Pengertian efektifitas pemberdayaan ekonomi

Menurut Ravianto dalam Masruri dan Imam, pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.¹⁶

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan

¹⁶Masruri and Imam Muazansyah, *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 2 (2017): 364–393.

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Jadi, menurut peneliti efektifitas pemberdayaan ekonomi adalah unsur penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotifasi, dan membangkitkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

3. Bentuk Pemberdayaan

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.¹⁷

¹⁷Suhela Putri Nasution and others, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Sumber Daya Alam Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa', *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 2.2 (2023), 102–12.

Dalam prakteknya pekerja sosial yang berbasiskan pemberdayaan baik pekerja sosial maupun klien melakukan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif bagi klien, kerjasama kolaboratif berarti merupakan aktualisasi pemberdayaan. Proses pemberdayaan secara umum berdasar konsep di atas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹⁸

- a. Merumuskan relasi kemitraan
- b. Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada
- c. Mendefinisikan arah yang ditetapkan
- d. Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan
- e. Menganalisis kapabilitas sumber
- f. Menyusun *frame* pemecahan masalah
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan
- h. Mengakui temuan-temuan
- i. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.

Pemberdayaan ekonomi secara umum merupakan proses yang sengaja dilakukan terus-menerus yang dilakukan pada individu atau kelompok dan organisasi. Dapat di katakan pemberdayaan ekonomi yang sempurna, apabila dapat melaksanaka proses-proses

¹⁸Suaib, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, ed. by Umar Nain, Catakan Pe (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023).

sesuai teori di atas. Dalam arus perubahan sosial sekarang ini, pembicaraan tentang peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi penting untuk dianalisis. Hal itu karena sampai sekarang pesantren masih menjadi magnet sosial yang dapat menarik berbagai pihak untuk berakomodasi bahkan menumbuhkan vitalitas dan sumber inspirasi baru dalam menghadapi tantangan modern dewasa ini.¹⁹

Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Salah satu bentuk Pemberdayaan masyarakat juga adalah dalam bentuk pembuatan program-program untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang baik. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat

¹⁹Rizal Muttaqin, 'Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1.2 (2016), 65-94 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).65-94](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94)>.

lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak.²⁰

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan pemberdayaan tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Menurut Sulistyani dalam Silvina dan Luhur, tujuan pemberdayaan adalah membantu pengembangan dari masyarakat lemah, renta, miskin, marjinal dan kelompok wanita yang didiskriminasi atau dikesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.²¹

Sementara, menurut Agus Syafi'i dalam Silvina dan Luhur, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi

²⁰Theresa Oktari Wurara, Masye S. Pangkey, and Joorie Ruru, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Usaha Mikro Di Kelurahan Imandi Pada Pandemi Covid 19', *Jurnal Administrasi Publik*, 7.102 (2021), 61–69.

²¹Silvina Choiratul Fahmi and Luhur Prasetyo, 'Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'Lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)', *Muslim Heritage*, 5.2 (2020), 369

dirinya. Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.²²

Secara umum, ada dua model kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu model *top down* dan model *bottom up*. Model *top down* cenderung menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *policy centered* karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Artinya dalam model pemberdayaan melalui pendekatan *top down*, sasaran pemberdayaan hanya menjadi objek sasaran dari yang akan menerima

²²Silvina Fahmi Choirotul and Luhur Prasetyo, *Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 345–369.

dan menikmati hasil pemberdayaan dilakukan oleh pihak luar dari sekumpulan obyek pemberdayaan.²³

Payne dalam Silvina dan Luhur mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan, pada intinya bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.²⁴

Dari teori di atas dapat di pahami bahwa suatu proses pemberdayaan bertujuan untuk membantu rekan kerja dalam mengambil keputusan, dan mengurangi hambatan dalam melakukan tindakan. Oleh karena itu, rasa percaya diri timbul akibat adanya bantuan dari rekan kerja.

²³Silvina Fahmi Choitrotul and Luhur Prasetyo, *Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 345–369.

²⁴Silvina Fahmi Choitrotul and Luhur Prasetyo, *Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Muslim Heritage 5, no. 2 (2020): 345–369.

5. Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Secara Umum

Menurut Agus Syafi'i dalam Baihakki, Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Tahap persiapan: pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahap pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat

²⁵Budhi Baihakki, *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Yayasan Bunga Melati Indonesia (YBMI) Di Perigi Baru* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan dengan jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem

komunikasi untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- g. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Dalam pemberdayaan ekonomi secara umum memiliki tahap-tahap pemberdayaan yang dapat di terapkan, yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformalisasi rencana aksi, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Dari 7 tahap pemberdayaan di atas dapat dikatakan pemberdayaan yang efektif apabila semua tahap pemberdayaan berjalan baik dan lancar.

6. Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Islam memandang suatu pemberdayaan atas

masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan suatu aspek yang sangat penting dimana didalamnya ditanamkan hal-hal yang bukan hanya bersifat duniawi namun juga akhirat. Dengan kata lain, pemberdayaan yang diciptakan memberikan sebuah manfaat, bukan hanya setiap individu namun bermanfaat untuk kelompok (masyarakat) sehingga membuatnya mandiri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya dan juga umat agar menjadi lebih baik.

7. Bentuk dan Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Menurut Islam

Menurut Agus Efendi dalam Dian, ada tiga tempat pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra rohaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena degradasi moral masyarakat Islam saat ini sangatlah memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi

²⁶Mochamad Rozikin Matthoriq, Suryadi, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)," Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 3 (2014): 426–432,

oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilahnya. Keadaan ini masih diperparah oleh gagalnya pendidikan agama dihampir semua pendidikan. Karenanya, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total *ruhaniah Islamiyah*. *Kedua*, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK. Keadaan ini juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan area bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa kemiskinan dan ketertinggalan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan

masyarakat sendiri. Karenanya, di perlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.²⁷

Hal Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 26:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْدِرُ عَفْرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (الرعد: 26).

Artinya: “Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat”.

Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. Agar pengembangan ekonomi dapat merealisasikan tujuan syariah, maka seidealnya jika dia

²⁷Dian Jaelani Iskandar, 'Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)', Jurnal Eksyar, 1.1 (2014), 18–34.

memiliki beberapa kriteria, yang terpenting diantara kriteria-kriteria merupakan sebagai berikut:²⁸

- a. Pengembangan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika tidak dijalankan secara komprehensif.
- b. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syariah.
- c. Idealnya, pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua lapisan masyarakat.
- d. Pengembangan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan syariah dan ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya
- e. Sesungguhnya sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan (*income*) tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
- f. Sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar *Radiyahallahu Anhu* terfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.

²⁸Abdul Aziz, *Dasar Ekonomi Islam*, ed. by tim FOKKER, Staida Press (Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2018) <<http://u.lipi.go.id/1180428290>>.

8. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membantu sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki keluarga. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *break down* dari hubungan antara subyek dan obyek.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pesantren setidaknya memiliki tiga motif, Pertama, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. Kedua, motif sosial, karena Kiai juga seorang pemimpin yang harus mengatasi krisis ekonomi setempat. Ketiga, motif politik, karena pemegang kekuasaan setempat mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro. Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga

kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.²⁹

Lembaga keagamaan memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut:³⁰

- a. Potensi sumber daya manusia dengan tokoh agama yang kharismatik dan merupakan panutan serta kepercayaan setempat.
- b. Potensi sumber daya alam, terutama bagi lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki lahan luas.
- c. Potensi kelembagaan, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang telah berdiri lama dan memiliki jumlah anggota yang besar dan tersebar di mana-mana.
- d. Potensi pasar, mengingat adanya hubungan sosial dan kekerabatan antara lembaga keagamaan dengan masyarakat sekitar.

²⁹Mohammad Nadzir, 'Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 37–56 <<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>>.

³⁰Tenten Tedjaningsih, Suyudi, and Hendar Nuryaman, 'Institutional Role in the Development of Mendong Agribusiness', *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4.2 (2018), 210–26.

- e. Potensi teknologi sebagai sarana di mana lembaga keagamaan merupakan lembaga strategis untuk mengembangkan teknologi.

Program pengembangan ekonomi yang dikembangkan oleh pesantren sebagai bagian dari tuntutan pendidikan, ekonomi dan dakwah pesantren itu sendiri, dampak positif kegiatan perkonomi pesantren dirasakan oleh seluruh warga di dalam pesantren maupun warga sekitar pesantren.³¹

Solichin menuturkan dalam jurnal Ana dan Laila bahwa proses pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang dijalankan pesantren berorientasi pertama, pandangan Pengasuh Pondok Pesantren tentang pengembangan dan ketahanan ekonomi adalah tiadanya ketergantungan pesantren dengan pihak eksternal dalam berbagai aktivitasnya. Kedua, Pondok Pesantren mempertahankan kemandiriannya dengan upaya-upaya, yaitu secara sosial politik, berupaya tetap berada di atas semua golongan dan kekuatan sosial politik di luar pesantren. Upaya secara ekonomi, mengembangkan

³¹Ana Zainiyah and Lailatul Qadariyah, 'Trend Bisnis Sebagai Pengembangan Dan Ketahanan Ekonomi Pesantren Pada PP. Manbaul Ulum Bata-Bata, Darul Ulum Banyuanyar, Dan PP. Al Mujtama'', *Jurnal Kaffa*, 1.4 (2022), 1–29.

berbagai badan usaha yang dengannya dapat membiayai kegiatan pendidikannya.³²

9. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Pemberdayaan menunjukkan kapasitas individu atau kelompok masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk:³³

- a) Memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memiliki kebebasan, yang berarti tidak hanya bebas untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga bebas dari kelaparan dan sakit.
- b) Menjangkau sumber daya yang menghasilkan uang, yang memungkinkan mereka mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c) Ikut serta dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhinya.

Keberdayaan masyarakat adalah ketika masyarakat memiliki kekuatan, daya, atau kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang serta pilihan

³²Ana Zainiyah and Lailatul Qadariyah, 'Trend Bisnis Sebagai Pengembangan Dan Ketahanan Ekonomi Pesantren Pada PP. Manbaul Ulum Bata-Bata, Darul Ulum Banyuwangi, Dan PP. Al Mujtama'', *Jurnal Kaffa*, 1.4 (2022), 1–29.

³³Ruslan Abdul Ghofur, *Pola Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Pesantren* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

pemecahannya sendiri. Tiga faktor digunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat, yaitu:³⁴

- a) Kemampuan dalam pengambilan keputusan
- b) Kemadirian
- c) Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Di sisilain, proses pemberdayaan adalah siklus atau proses di mana orang bekerja sama dalam kelompok formal dan nonformal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang telah direncanakan.³⁵

Dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada manusia bahwa mereka harus berusaha. seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: 10).

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

10. Kendala Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Ada beberapa kendala dalam pemberdayaan ekonomi pesantren, yaitu sebagai berikut:

³⁴Kesi Widjajanti, ‘Model Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.1 (2011), 15–27.

³⁵Kesi Widjajanti, ‘Model Pemberdayaan Masyarakat’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.1 (2011), 15–27.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Jusuf Irianto sebagaimana dikutip oleh A. Najili, masalah kualitas SDM sebetulnya bukan hanya masalah pondok pesantren saja, tetapi dalam skala yang lebih luas, yakni masyarakat Indonesia secara umum.³⁶

b. Kelembagaan

Menurut Halim dalam penelitian Ernawati secara garis besar, model kelembagaan Pondok Pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:³⁷

1) *Integrated Structural*

Maksudnya adalah semua unit atau bidang yang ada dalam Pondok Pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dengan Pondok Pesantren. Artinya, semua unit atau bidang dengan berbagai ragam spesifikasi, berada dalam suatu struktur organisasi.

2) *Integrated Non-Structural*

Maksudnya adalah unit atau bidang usaha yang dikembangkan Pondok Pesantren terpisah

³⁶A. Najili Aminullah, 'Peran Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Kualitas SDM Indonesia (Sebuah Tela'ah Terhadap Keseimbangan Nilai-Nilai Imtaq Dan Iptek)', *Geneologi PAI : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2018), 159–68.

³⁷Ernawati, 'Strategi Pengembangan Unit Usaha Pondok Pesantren Modern Babussa'Adah Bajo' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

secara struktural organisatoris. Artinya, setiap bidang usaha mempunyai struktur tersendiri yang independen.

3) Terobosan/Inovasi dan *Net-Working*

Problem ketiga yang dirasa mendasar adalah kurangnya keberanian Pondok Pesantren untuk melakukan terobosan keluar, atau membuat jaringan, baik antar Pondok Pesantren maupun Pondok Pesantren dengan institusi lain.

C. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya. Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigenous*) Indonesia. Sesuai PP tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan rahmat Tuhan yang maha Esa. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.³⁸

³⁸Peraturan Pemerintah Nomor 55, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan', 2007.

Jadi, pondok pesantren dapat diartikan tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pondok pesantren menerapkan prinsip *tasamuh* (toleran), *tawasth wal i'tidal* (sederhana), *tawazun* (penuh pertimbangan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Tujuan umum Pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikan sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara. Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.³⁹

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut⁴⁰:

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.

³⁹Hikmah and Zainap Hartati, 'Kontribusi Pondok Pesantren Hidayatulah Bagi Masyarakat Palangka Raya', *Al-Fikri Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4.1 (2021), 1–12.

⁴⁰Zulhimma, 'Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Darul 'Ilmi*, 01.02 (2013), 166–67.

- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan *mubaligh* yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga santri pembangunan mikro (keluarga) dan *regional* (pedesaan/masyarakat sekitar).

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan didirikannya pondok pesantren yaitu untuk menjadikan generasi anak muda menjadi yang lebih baik lagi dan mensejahterakan lingkungan masyarakat.

2. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Unsur-unsur pondok pesantren adalah sebagai berikut:

a. Kiai

Pengertian Kiai menurut Suyata, bahwa dalam kebudayaan Jawa tradisional laki-laki yang berusia lanjut, arif dan dihormati juga sebutan Kiai melekat pada dirinya. Terutama bila ia sebagai “pimpinan masyarakat setempat dan akrab dengan rakyatnya, memiliki pengaruh kharismatik, wibawa, walaupun

kedudukan sosial mereka yang istimewa tidak mengubah gaya hidupnya yang sederhana”.⁴¹.

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam Zulhimma asal usul perkataan Kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda.⁴²

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya Kiai Garuda Kencana dipakai sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta
- 2) Gelar kehormatan untuk orang – orang tua umumnya
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik kepada santrinya.

b. Pondok

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam Zulhimma, Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai. Asrama atau pondok berada dalam lingkuan kompleks pesantren,

⁴¹S Nasution S Nasution, 'Pesantren Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, VIII. Pendidikan Islam (2019), 125–36.

⁴²Zulhimma, 'Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Darul 'Ilmi*, 01.02 (2013), 166–67

dimana Kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴³

Pondok pesantren dapat di pahami sebagai lembaga agama pendidikan dan pengajaran agama, dimana seorang Kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri, dan santri bertempat tinggal di dalam pondok pesantren tersebut.

c. Masjid

Masjid merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi *ukhrawi* maupun *duniawi* dalam ajaran Islam, disamping berfungsi sebagai tempat melakukan sholat berjamaah setiap waktu sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Biasanya waktu belajar mengajar dalam pesantren.⁴⁴

d. Santri

Santri merupakan siswa yang menuntut ilmu di pesantren. Santri terbagi menjadi dua yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang berdatangan dari daerah-daerah yang jauh

⁴³Zulhimma, 'Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Darul 'Ilmi*, 01.02 (2013), 166-67

⁴⁴Zulhimma, 'Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Darul 'Ilmi*, 01.02 (2013), 166-67

sehingga tidak memungkinkan untuk pulang kerumahnya, maka jalan yang harus dilakukan adalah mondok di pesantren. Sedangkan santri kalong merupakan santri-santri yang berasal dari daerah sekitar sehingga mereka dapat pulang kerumahnya masing-masing, biasanya santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulan pergi dari rumahnya ke pondok pesantren.⁴⁵

e. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik

Kitab Kuning adalah sebuah kitab yang ditulis pada zaman pertengahan oleh para ulama. Seorang santri dapat dikatakan teruji dan mahir adalah ketika mereka mampu membaca serta menjelaskan isi dari kitab-kitab kuning tersebut. Untuk dapat menguasai hal tersebut seorang santri hendaknya dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu bantu seperti: *ma'ani*, *syaraf*, *nahwu*, *bayan*, *balaghah*, dan sebagainya.⁴⁶

3. Karakteristik Pesantren

Menurut Ramayulis dalam Duhani ada delapan prinsip manajemen pendidikan Islam, yaitu: (1) Ikhlas, (2) kejujuran, (3) amanah, (4) adil, (5) tanggung jawab, (6)

⁴⁵Achmad Muchaddam Farhan, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*, ed. by Susanto, Ceetakan P (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2015).

⁴⁶Achmad Muchaddam Farhan, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*, ed. by Susanto, Ceetakan P (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2015).

dinamis, (7) praktis dan (8) fleksibel. Kedelapan prinsip di atas sejalan dengan gerak pondok pesantren. Pondok pesantren mempunyai keunikan atau karakteristik tersendiri dalam kepemimpinan yang terpusat di Kiai. Pada zaman sekarang dengan banyak pondok pesantren yang membuka sekolah atau *madrasah* dalam penyelenggaraan tentu membutuhkan pihak luar dalam menjalankan roda organisasi.⁴⁷

H.A. Mukti Ali dalam S Nasution mengemukakan karakteristik pendidikan pondok pesantren sebagai berikut:⁴⁸

- a. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan Kiai.
- b. Tunduknya santri kepada Kiai.
- c. Hidupnya hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
- d. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara dikalangan santri di pondok pesantren.
- e. Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pondok pesantren.
- f. Pendidikan disiplin sangat ditekankan.

⁴⁷Elfridawati Mai Dhuhani, 'Manajemen Pondok Pesantren; Studi Pengelolaan Santri Muallaf Di Pondok Pesantren AL Anshar Ambon', Jurnal Fikratuna, 9.1 (2018), 54–70.

⁴⁸S Nasution S Nasution, 'Pesantren Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, VIII. Pendidikan Islam (2019), 125–36.

- g. Berani untuk menderita mencapai sesuatu tujuan adalah merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh santri dalam pondok pesantren.

4. Manajemen Pesantren

Lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah pesantren, mengingat adanya kebebasan dari Kiai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu dengan penekunan pada kajian tertentu. Menurut Qomar dalam Mulya Putra dkk, ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua yakni: pesantren tradisional (*salaf*) dan pesantren modern (*khalaf*). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren *khalafi* bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi.⁴⁹

Kebanyakan dari pesantren menerapkan pola manajemen yang berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan. Konsep tersebut menjiwai hampir semua aktifitas di pesantren. Hanya saja konsep tersebut pada masalah banyak memiliki kelemahan, utamanya disebabkan karena tidak diimbangi

⁴⁹Mulya Putra and others, 'Manajemen Pembelajaran Di Pesantren Dalam Meningkatkan Potensi Santri: Studi Kasus Di Pesantren Al-Fatah Kerinci Dan Pesantren Arafah Sungai Penuh', *Sustainable Jurna; Kajian Mutu Pendidikan*, 4.1 (2021), 75–91.

kemampuan dan profesionalisme yang memadai. Meski tidak dapat dipungkiri, konsep tersebut dapat menjadi modal dasar utama dalam kehidupan dan eksistensi pesantren.

Masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala dikelola secara profesional. Dengan pengelolaan yang sama, pesantren yang sudah besar akan bertambah besar lagi. Sebaliknya, pesantren yang telah maju akan mengalami kemunduran manakala manajemennya tidak terurus dengan baik. Sementara itu, jika mengabaikan manajemen, pesantren yang kecil akan gulung tikar dalam menghadapi tantangan multidimensi.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi yang lebih komprehensif dan menyebar keberbagai komponen kepesantren yang selama ini menjadi titik balik kelemahan pesantren. Kemudian diikuti langkah-langkah praktis agar segera dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait langsung dengan penataan pesantren. Solusi beserta langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menerapkan manajemen secara profesional. Hal ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut ini:

⁵⁰Miftahul Ulya, 'Manajemen Pondok Pesantren El-Fira Purwokerto' (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

- 1) Menguasai ilmu dan praktik tentang pengelolaan pesantren
 - 2) Menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan
 - 3) Mampu menunjukkan *skill* yang dibutuhkan pesantren
 - 4) Memiliki pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai tantangan pengelolaan
 - 5) Memiliki kewajiban moral untuk memajukan pesantren
 - 6) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pesantren.
- b. Menerapkan kepemimpinan yang kolektif. Strategi ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut ini:
- 1) Mendirikan yayasan
 - 2) Mengadakan pembagian wewenang secara jelas
 - 3) Memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pegawai
 - 4) Menjalankan roda organisasi bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak secara kolektif
 - 5) Menanggung resiko secara bersama-sama.

- c. Menerapkan manajemen terstruktur. Strategi ini dapat dilalui dengan langkah-langkah berikut ini:
- 1) Menyusun struktur organisasi secara lengkap
 - 2) Menyusun deskripsi pekerjaan (*job description*)
 - 3) Menjelaskan hubungan kewenangan antar pegawai dan pimpinan, baik secara vertikal maupun horizontal.
 - 4) Menanamkan komitmen terhadap tugas masing-masing pegawai
 - 5) Menjaga kode etik kewenangan masing-masing pegawai.
- d. Mengadakan pembaruan secara berkesinambungan. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut:
- 1) Mengadakan pembaruan dan penambahan institusi
 - 2) Mengadakan pembaruan sistem pendidikan
 - 3) Mengadakan pembaruan sistem kepemimpinan
 - 4) Mengadakan pembaruan sistem pembelajaran
 - 5) Mengadakan pembaruan sistem strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran
 - 6) Memperkuat SDM para ustadz, perpustakaan, dan laboratorium.
- e. Mengembangkan sentra-sentra perekonomian. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Mendirikan toko-toko yang menyediakan kebutuhan para santri
- 2) Mengelola konsumsi para santri
- 3) Mendirikan koperasi
- 4) Mendirikan pusat-pusat pelayanan publik yang berorientasi

